

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

**Nama** : Surung Charles Lamhot Bantjin  
**NIM** : 151801065  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Warjio, MA  
**Pembimbing II** : Drs. Kariono, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi dan menjelaskan apa yang menjadi yang menjadi kendala/hambatan (regulasi, SDM, kultur dan lain-lainnya dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi. Metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara, penyebaran kuisioner dan telaah. *Key informan* adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Dairi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Dairi ULP belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Kesatu, komunikasi yang memperlihatkan bahwa belum terlihat koordinasi unit layanan pengadaan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan anggota Kelompok Kerja ULP tidak dilibatkan dalam melakukan kaji ulang dokumen pengadaan. Kedua, sumber daya yang memperlihatkan masih adanya dalam ULP yang tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, dan kurangnya personil ULP khususnya pada sekretariat ULP serta belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan kondisi daerah. Ketiga, disposisi yang memperlihatkan bahwa masih adanya anggota Kelompok Kerja ULP yang mengabaikan dan kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya seperti memberikan laporan hasil pengadaan kepada Kepala ULP dan masih kurang maksimal khususnya dalam pengelolaan pelaksanaan barang/jasa, kurangnya tingkat kemampuan pemahaman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Keempat, struktur birokrasi yang memperlihatkan bahwa ULP masih melekat pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi dan bersifat sementara (*ad hoc*) dan organisasinya masih bersifat struktural padahal ULP banyak melakukan kegiatan teknis di lapangan.

**Kata kunci** : Implementasi, Kepala Unit Layanan Pengadaan, Anggota Kelompok Kerja ULP

## ABSTRACT

### ***THE IMPLEMENTATION OF REGULATION DAIRI NUMBER 20 YEAR 2014 ABOUT ESTABLISHMENT OF UNIT SERVICE PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES DAIRI GOVERNMENT***

***Name*** : ***Surung Charles Lamhot Bantjin***  
***NIM*** : ***151801065***  
***Study Program*** : ***Master of Public Administration***  
***Supervisor I*** : ***Dr. Warjio, MA***  
***Supervisor II*** : ***Drs. Kariono, MA***

*The purpose of this research is to know and analyze the implementation of Dairy Regent Regulation No. 20 year 2014 on Establishment of Procurement Unit (ULP) of Dairi Regency Government and explain what become obstacles (regulation, human resources, culture and others in Implementation implementation Regulation of Dairi Regent No. 20 year 2014 on Establishment of Procurement Service Unit (ULP) of Dairi District Government. Method of research with qualitative descriptive approach Technique Data collecting by interview, questionnaire distribution and study. Key informant is Head of Procurement Unit of Dairi Regency. Data analysis with data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that the implementation of Dairy Regent Regulation No. 20 of 2014 on the Establishment of Procurement Services Unit (ULP) of Dairi ULP Regency Government has not been optimal. This can be seen from several aspects. First, the communication shows that the coordination of procurement services unit with budget users/authorized users of budget and members of the ULP working group is not involved in reviewing procurement document. Secondly, the resources that are still present in the ULP do not have a procurement expertise certificate, and the lack of ULP personnel, especially in the ULP secretariat and do not have Standard Operating Procedures (SOP) in accordance with local conditions. Third, the disposition shows that there are still members of the Working Group who neglect and lack the focus in performing their duties such as reporting the results of procurement to the Head of ULP and still not maximal, especially in the management of goods/services.*

**Keywords:** *Implementation, Head of Procurement Unit, ULP working group*